

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) TAHUN 2019

Oleh : Imalia Novria

Email : Imalianovria88@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Area Traffic Control System (ATCS) is traffic control by aligning red light times on the highway network of a city. Traffic regulation through this system requires parameters of the number of vehicles and vehicle travel time. The traffic rhythm arrangement will be better if it applies the Area Traffic Control System (ATCS) technology at all traffic intersections in the city. The purpose of this study is to describe the Regional Government Management of Pekanbaru City on the Implementation of the Area Traffic Control System Program in the year

The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is at the Transportation Department of Pekanbaru City. Types and sources of research data were divided into primary data with purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to ATCS. Data collection techniques used by interview and documentation. Meanwhile, data analysis was performed using qualitative analysis.

The results of this study are that the Regional Government Management of Pekanbaru City on the Implementation of the Area Traffic Control System Program in 2019 has not been carried out optimally, there are still problems found in the field due to several factors, namely limited budget funds, lack of quality and quantity of resources owned, lack of public understanding. to the ATCS program and the lack of awareness in traffic.

Keywords: *Local Government Management, Program Implementation, ATCS*

PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah ditetapkan, pemerintah pusat selaku pendelegasian kewenangan memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah sebagian besar kepengurusan pemerintah dijalankan oleh pemerintah daerah dan kewenangan menjalankan roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola hasil alam dan sumber daya manusia untuk bisa di jadikan masukan Pendapatan Asli Daerah dan untuk pembangunan dan mensejahterakan daerah.

Kota Pekanbaru sebagai sebuah kota yang menuju kota metropolitan, disesaki oleh kendaraan bermotor yang sangat banyak. Kepadatan lalu lintas di Kota Pekanbaru menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian kondisi ini juga diperparah oleh

Program bantuan hibah dari pusat ke daerah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

Area Traffic Control System atau ATCS berfungsi sebagai sebuah sistem pengaturan lalu lintas bersinyal terkoordinasi yang diatur mencakup satu wilayah secara terpusat, dengan ATCS maka dapat dilakukan upaya manajemen

petugas yang tidak bisa berada dilapangan selama 24 jam, Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru adalah dengan menerapkan pengaturan lalu lintas menggunakan teknologi Area Traffic Control System (ATCS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi salah satunya tentang Perhubungan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Area Traffic Control System di Dinas Perhubungan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota wajib menyelenggarakan program Area Traffic Control System tersebut yang terangkum dalam urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam hal ini Kota Pekanbaru sebagai salah satu ibu kota Provinsi Riau yang mendapat otonomi dari pemerintah pusat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan program Area Traffic Control System sebagai pengatur lalu lintas dengan teknologi modern.

rekayasa lalu lintas yang mengkoordinasi semua titik – titik persimpangan bersinyal melalui pusat kontrol ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.

Dengan adanya Area Traffic Control System ATCS, penataan siklus lampu lalu lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara real time melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali oleh pengendara yang tidak mentaati peraturan dan penguraian kemacetan lalu lintas, yang seharusnya mendapatkan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan Area Traffic Control System (ATCS).

Adapun Fungsi Area Traffic Control System (ATCS) yaitu:

1. Mengurangi kemacetan yang tidak efektif
2. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan.
3. Memberikan kelancaran pelayanan bagi kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan lain-lain.
4. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.

Untuk mengatasi kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru, maka Dinas Perhubungan dibantu oleh Satlantas Polresta Pekanbaru yang disebutkan didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 36

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru telah melakukan berbagai

kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut.

Tetapi, terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kenakalan upaya dalam melakukan pembinaan lalu lintas, namun tetap saja hal itu masih dirasakan belum maksimal hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas. Perencanaan dan pengaturan di bidang lalu lintas terasa tidak efektif dan efisien bagi pengendara, seperti terlalu jauhnya tempat untuk berbalik arah, rambu-rambu yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengendara dan pejalan kaki, dan masalah lalu lintas lainnya.

Bertambahnya jumlah volume kendaraan yang melewati sejumlah jalan yang ada di kota Pekanbaru juga semakin meningkat dan itu tidak sesuai dengan ruas jalan yang ada di kota Pekanbaru. Tentunya hal ini menjadi permasalahan bagi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam mengatasi kemacetan yang ada di kota Pekanbaru. Kondisi ini terlihat jelas pada sejumlah jalan yang ada di kota Pekanbaru, baik pada siang hari yang merupakan jam makan siang kerja, maupun pada sore hari yang merupakan tingkat pengguna jalan yang tertinggi pada setiap harinya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Manajemen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019”**

RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019?
2. Apa Saja Hambatan Manajemen Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019?

KERANGKA TEORI

Manajemen Pemerintahan

Menurut (Nawawi, 2013) Pihak manajemen harus responsif dengan perkembangan ini dengan melakukan sejumlah penyesuaian, kemudian mengambil manfaat atau keuntungan dari sejumlah perubahan tersebut. Misalnya dengan mengadopsi sistem apa yang sering disebut e-government. Jika tugas dan fungsi manajemen itu meliputi fungsi planning, organizing, actualing, dan controlling atau yang sering dingkat POAC, maka jika disederhanakan ke dalam perspektif teknologi informasi (IT), pada dasarnya tugas umum manajemen pemerintahan adalah melayani masyarakat yang didalamnya berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data maupun informasi yang penting bagi masyarakat.

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud

Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011), antara lain :

- 1) Perencanaan Pemerintahan;

Dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah- langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

Menurut (Nurman , 2017) manajemen sangatlah berperan dalam organisasi termasuk organisasi pemerintahan dimana terdapat fungsi-fungsi manajemen yang bekerja didalam pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan yang bersifat strategik yang dilakukan oleh pemerintah yang diyakini seiring berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan pada pemerintahan yang dijalankannya demi tercapainya tujuan dari negara. Sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh perancangannya. Untuk menyusun perencanaan strategik, organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa depan.

Menurut (Indrajid, 2016) proses tata kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan adalah menyusun rencana strategis teknologi informasi. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di sebuah institusi sangatlah penting untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi

kepentingan dan kebutuhan lembaga dimaksud. Keselarasan antara tujuan organisasi dengan program maupun portofolio proyek pembangunan teknologi informasi sangatlah penting untuk memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan;

Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun Sumber Daya Benda (SDB). Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

Menurut (Nurman , 2017) Bila dilihat dari fungsi pengorganisasian, manajemen pemerintahan bekerja dengan sistem jaringan. Semakin banyaknya jaringan yang bisa didapat pada saat ini akan memudahkan pemerintah dalam mengorganisasikan sesuatu. Kerja sama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih banyak dilakukan. Dengan sendirinya hubungan kerja secara hierarki menjadi semakin berkurang.

Menurut (Indrajid, 2016) dalam sebuah organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, perlu secara jelas dirumuskan peranan, fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap individu yang mengelola maupun menggunakannya. Dengan semangat tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance), harus ditetapkan siapa-siapa saja yang berhak dan bertanggung jawab terhadap penerapan serta pemeliharaan teknologi informasi berbasis asas transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Pimpinan organisasi harus memastikan adanya

strategi, aturan, kebijakan dan prosedur yang ditaati serta dipatuhi seluruh pemangku kepentingan.

3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan;

Dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

Menurut (Nurman , 2017) dengan adanya jaringan kerja, maka fungsi penggerakan akan lebih banyak berupa garis-garis kebijakan. Para anggota organisasi yang cerdas dan kreatif akan mampu menerjemahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dalam hal ini, delegasi wewenang diberikan kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Menurut (Indrajid, 2016) mengatakan bahwa dalam implementasinya, para pengguna atau user-lah yang akan memakai, menggunakan, menerapkan, atau mengoperasikan teknologi yang tersedia di organisasi atau perusahaan. Oleh karena itulah harus tersedia dokumen penerapan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengoperasikan berbagai sistem yang ada di organisasi. Disamping itu diperlukan pula serangkaian pelatihan atau training bagi para pengguna agar lancar serta mahir mengoperasikan teknologi yang ada.

4) Kontrol pemerintahan;

Dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Fungsi pengawasan dan pengendalian menurut (Nurman , 2017) yang dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan justru akan

semakin mendalam dan luas, seiring dengan membesarnya desentralisasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk privatisasi. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan terjadi suasana tanpa kendali.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. (Sutinah, 2011) Hasil dari wawancara nantinya akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang sedang diteliti. (Suyanto, 2007) Dokumentasi diperoleh dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topic penelitian. Data Dokumentasi sangat membantu penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip oleh Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan dari Manajemen Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Area Traffic Control System, dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan menggunakan kajian teori Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha yang menerangkan keberhasilan tentang Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kajian teori Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160).

a. Perencanaan

Pemerintahan Program ATCS

Fungsi perencanaan merupakan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Perencanaan dalam Manajemen Pemerintahan adalah proses

penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Perencanaan di artikan sebagai usaha untuk membuat pilihan tindakan dan pilihan alternatif yang dapat disediakan dalam bentuk strategi, kebijakan, program maupun prosedur dalam mencapai tujuan organisasi serta dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen paling dasar dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan di Kota Pekanbaru diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya keselamatan, ketertiban, kelancaran keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Menimbang tingginya grafik kepadatan jumlah kendaraan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berinisiatif memasang perangkat ATCS untuk pendukung kegiatan dimaksud dan juga mendukung visi misi “Smart City Kota Madani” dengan melakukan pemasangan CCTV, Speaker Announcer Serta Controller APILL di beberapa titik ruas jalan di Kota Pekanbaru yang

semuanya terkoneksi dengan ruangan CCRoom guna memantau arus lalu lintas dan memberikan peringatan kepada pengguna jalan, terkait pelanggaran lalu lintas atau peringatan lain melalui pengeras suara yang ada di setiap persimpangan tersebut melalui ruangan CCRoom Area Traffic Control System atau ATCS

b. Pengorganisasian

Sumber-Sumber

Pemerintahan Dalam program ATCS

Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Secara umum batasan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya.

c. Pelaksanaan Sumber-Sumber Pemerintahan ATCS

Setelah perencanaan dibuat dan pengorganisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan/penggerakan/pengarah. *Directing* sering juga disebut sebagai *actuating* dalam hal ini

perintah merupakan alat utama pemimpin dalam menggerakkan orang-orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan sebagainya sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana.

Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen Pemerintahan. Fungsi penggerakan dalam pelaksanaan program Area Traffic Control System dilakukan oleh Satgas Pusat Kendali Manajemen dan Informasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satgas Pusat Kendali Manajemen dan Informasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS)

Dalam melakukan pemasangan Area Traffic Control System Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Cumicon Indonesia. Pt ini memproduksi alat Area Traffic Control System atau (ATCS) dan memiliki tenaga ahli yang berkompeten dalam bidangnya terutama dalam pemasangan ATCS.

2) Pelaksanaan

Penyampaian Informasi Lalu Lintas Kepada Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di bidang Manajemen Rekayasa dan Informasi Lalu Lintas menyediakan informasi lalu

lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Informasi yang disediakan meliputi informasi lalu lintas terkini dan informasi lalu lintas rute perjalanan serta informasi kecepatan yang dapat ditempuh jika melewati rute tersebut. Dengan adanya informasi ini dapat diperoleh manfaat yaitu mengetahui kondisi terkini lalu lintas di Kota Pekanbaru sehingga masyarakat dapat memilih rute yang paling efektif.

Penyampaian informasi lalu lintas kepada masyarakat dengan melakukan traffic report, VMS (Variabel Message Sign). Traffic Report merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi secara langsung tentang pantauan lalu lintas terkini (real time) di Kota Pekanbaru. Kegiatan traffic Report yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terutama di bidang Pusat Kendali Manajemen dan Informasi Lalu Lintas dilakukan secara rutin yaitu sebagai berikut:

d. Kontrol Pemerintahan dalam program ATCS

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan dengan cara paling efektif. Pengawasan merupakan proses pengamatan, penentuan standart yang akan dicapai, menilai pelaksanaan kegiatan, dan mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan dapat mencakup penegakan hukum, pertanggung jawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika dalam pemerintahan yang berlaku. Pada umumnya, pengawasan dilakukan oleh pimpinan instansi atau pegawai yang lebih tinggi kedudukannya dari pegawai yang diawasi.

Pengawasan ini dilakukan bukan sebagai kegiatan sampingan atau kegiatan untuk mencari kesalahan-kesalahan melainkan menganalisa proses-proses yang dilakukan organisasi dalam proses pencapaian tujuan bersama. Sebuah kegiatan atau program serta kebijakan pastinya memiliki harapan untuk dapat mencapai tujuan seperti yang dicita-citakan. Mengukur apakah kegiatan ini sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi ini atau hanya sebagai beban bagi orang lain atau lembaga.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Area Traffic Control System atau

ATCS dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Diawasi oleh seluruh stakeholder terkait, karena telah dilakukan transparansi oleh dinas terkait melalui media elektronik. Prosedur pengawasan dalam program Area Traffic Control System atau ATCS ini dilakukan di dalam ruang pusat kontrol Area Traffic Control System atau ATCS yang disebut dengan CCRoom.

CCRoom merupakan ruangan untuk memantau status kontrol persimpangan, memantau arus lalu lintas di jalan.

2. Faktor Penghambat Manajemen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019

Dalam setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin ditemui selama pelaksanaan program tersebut. Tidak terkecuali dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai sektor yang berperan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib di Kota Pekanbaru. Manajemen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS) memiliki beberapa hambatan. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah berusaha melakukannya dengan optimal dan efektif tetapi hambatan tetap masih ada, hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman dan Kurangnya Pegawai ATCS

Dalam pelaksanaan program Area Traffic Control atau ATCS tahun 2019, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menemukan hambatan dan kendala yaitu masih banyaknya pegawai- pegawai Dinas perhubungan Kota Pekanbaru yang masih kurang memahami tentang program Area Traffic Control Sytem atau ATCS.

- b. Keterbatasan Anggaran

Dalam kondisi seperti ini keterbatasan anggaran adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan program Area Traffic Control System. Namun dalam mewujudkan program ini berjalan secara maksimal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala.

- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Berlalu Lintas.

Meskipun pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan informasi dan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas tetapi masyarakat masih tetap belum ada kesadaran tentang pentingnya berlalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam pelaksanaan program Area Tarffic Control System.

Karena sarana dan prasana yang belum memadai sehingga pengembangan untuk pelaksanaan program Area Traffic Control System belum terlaksana secara maksimal, salah satu penyebabnya adalah Keterbatasan Anggaran dana.

2. Manajemen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Program Area Traffic Control System (ATCS) Tahun 2019 relatif baik namun tetap saja belum maksimal. Dari aspek perencanaan cukup baik, namun dari pengorganisasian kurang maksimal karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya mempunyai 10 pegawai dibagian program Area Traffic Control System yang ditempatkan atau dihadapkan pada pekerjaan sesuai dengan bidangnya di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Dalam melaksanakan program Area Traffic Control System yaitu butuh dukungan dari masyarakat untuk keberhasilan program ini. Tetapi masyarakat masih belum bisa menyadari tata tertib berlalu lintas sehingga dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.

Saran

Dengan melihat hasil penelitian diatas, penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan Manajemen pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Program Area Traffic Control System (ATCS) dalam

mewujudkan tertib lalu lintas yang aman dan tertib yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dana menjadi salah satu kendala yang dijumpai oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam program Area Traffic Control System, oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Daerah juga ikut turut membantu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program Area Traffic Control System atau ATCS untuk dijadikan sebagai prioritas sebagai upaya memaksimalkan dana yang ada.
2. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat kerja secara berkesinambungan bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Satgas ATCS sehingga akan lebih meningkatkan profesionalisme kerja para pegawai dalam mendukung kinerja program Area Traffic Control System secara keseluruhan.
3. Perlu dilakukannya sosialisasi rutin kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya program baru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan memberikan informasi lalu lintas agar terwujudnya lalu lintas yang aman dan tertib bagi pengguna jalan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Adlin, A. (2013, Februari 19). *Metode Penelitian Sosial*. Dipetik November 1, 2020, dari researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/339353176_Metode_Penelitian_Sosial
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Media Group H.
- Indrajid, R. E. (2016). *Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: The Preinexus Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurman . (2017). *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutinah, B. S. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syafie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ hal tersebut pada pasal 1 ayat 29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Pekanbaru (PERDA SOTK) nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pekanbaru Pasal 2 ayat 1